

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE JAYA

ZULFIKAR ⁽¹⁾, ROZAILI ⁽²⁾, NURUL MARJANI

¹Ilmu Administrasi, Universitas Jabal Ghafur, Sigli
e-mail: zjolfikar@gmail.com , rozaili@unigha.ac.id

ABSTRACT

All over the world, the increase in population in developing and developed countries is accompanied by the same problem, namely a decrease in the level of public services for the community. The phenomenon of poverty in Indonesian cities like Papua is one example. Papua owns 26.80% West Papua 21.43% East Nusaa Tenggara 20.23% Maluku 16.23% Gorontalo 15.51% Aceh 14.75% and other cities One way to improve people's welfare is through community empowerment. This study found that the Pidie Jaya District Office of Social Affairs played an important role in empowering the community by changing the way people think. The Pidie Jaya District Office of Social Affairs itself has attempted to empower the community by offering assistance to economically disadvantaged communities. This type of descriptive research, a qualitative approach, is used in this study.

The results of the study show that the community empowerment program used by the Pidie Jaya District Office is still ineffective. How big or small the program depends on the wishes and resources of the community. Therefore, to carry out the Community Empowerment Development Program, the government and the community must work well together. Lack of agreement among the community, ignorance about how to look after, lack of knowledge about how to use rocks, and a very low budget are some of the obstacles that have prevented this program from being implemented. The advice that can be given in this study is that the Social Service Office of Pidie Jaya Regency The effectiveness of the Community Empowerment Development Program in Pidie Jaya Regency needs to be continued, by using a dynamic empowerment process or adapting to the typology of community empowerment and after each completion of a series of activities the community empowerment development program needs to be evaluated towards the development of community empowerment.

Keywords : Effectiveness, Program, Community Empowerment Development

ABSTRAK

Di seluruh dunia, peningkatan populasi di negara berkembang dan maju diiringi dengan masalah yang sama, yaitu penurunan tingkat pelayanan umum bagi masyarakat. Fenomena kemiskinan di kota-kota Indonesia seperti Papua adalah salah satu contohnya. Papua memiliki 26,80% Papua Barat 21,43% Nusa Tenggara Timur 20,23% Maluku 16,23% Gorontalo 15,51% Aceh 14,75% dan kota-kota lain. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Studi ini menemukan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya memainkan peran penting dalam memberdayakan masyarakat dengan mengubah cara orang berpikir. Dinas Sosial

Kabupaten Pidie Jaya sendiri telah berusaha untuk memberdayakan masyarakat dengan menawarkan bantuan kepada masyarakat ekonomi lemah. Jenis penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif, digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang digunakan oleh Dinas Kabupaten Pidie Jaya masih kurang efektif. Berapa besar atau kecilnya program tergantung pada keinginan dan sumber daya masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjalankan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik. Tidak adanya kesepakatan di antara komunitas, ketidaktahuan tentang cara menjaga, kekurangan pengetahuan tentang cara memanfaatkan bantuan, dan anggaran yang sangat rendah adalah beberapa hambatan yang menghalangi program ini untuk dilaksanakan. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya Efektivitas Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya perlu dilanjutkan, dengan menggunakan proses pemberdayaan yang dinamis atau menyesuaikan dengan tipologi keberdayaan masyarakat dan setiap selesai rangkaian pelaksanaan kegiatan program pengembangan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan evaluasi terhadap perkembangan keberdayaan masyarakat.

Kata kunci: *Efektifitas, Pengembangan, Program, Pemberdayaan, Masyarakat*

1. Pendahuluan

Di seluruh dunia, peningkatan populasi di negara berkembang dan maju diiringi dengan masalah yang sama, yaitu penurunan tingkat pelayanan umum bagi masyarakat. Fenomena kemiskinan di kota-kota Indonesia seperti Papua adalah salah satu contohnya. Papua memiliki 26,80% Papua Barat 21,43% Nusa Tenggara Timur 20,23% Maluku 16,23% Gorontalo 15,51% Aceh 14,75% dan kota-kota lain. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan otonomi daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi wewenang yang luas untuk mengawasi dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting untuk pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, upaya masyarakat yang mampu mengubah sikap dan perilaku dalam proses mengintegrasikan niat kepentingan kemitraan sebagai salah satu cara untuk

meningkatkan derajat manusia diperlukan. Dengan sumber daya alamnya yang potensial untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya, terutama dalam bidang pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, dan kelautan, Kabupaten Pidie Jaya memiliki posisi yang sangat strategis untuk mengembangkan perekonomian daerah di masa mendatang. Ini karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah daratan dan laut.

Menurut Kartasmita (2010:19) upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, (2) Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, (3) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat yang paling efektif dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat adalah *inner resources approach*. Pola ini menekankan

pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan keinginan dan kebutuhan kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah masalah yang mereka hadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki, Ross (2010: 77-78).

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar atas kelangsungan dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu pemerintah harus memiliki program program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan permasalahan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Menurut WRIhatnolo dalam Nugroho (2010:33-34) Upaya kesejahteraan masyarakat secara konseptual dapat dilakukan oleh empat jalur strategis yaitu perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, dan perlindungan sosial.

Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya banyak melakukan berbagai cara untuk mengurangi masalah kemiskinan, berbagai program pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan akan tetapi masalah saja kemiskinan belum berkurang secara signifikan. Masalah ini yang membuat Pemerintah terus berputar otak untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya. Pemerintah Pidie Jaya melalui Dinas Sosial sudah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya yang dilaksanakan dengan alokasi dana dari

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk tahun 2022, Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya yaitu:

- a) Program Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (PKK-KRSE).
- b) Koperasi,
- c) Dunia Usaha
- d) Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan,
- e) Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

Banyak upaya pemberdayaan masyarakat telah dilakukan, tetapi jumlah penduduk miskin tidak mengalami penurunan yang signifikan. Hal inilah yang membuat peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakatnya sebagai negara berkembang menjadi lebih penting. Pemberdayaan sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat. Namun, karena kepentingan masyarakat, potensi kemampuan masyarakat, dan sumber daya alam yang tersedia di daerah tersebut, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di masing-masing daerah tentu saja berbeda. Hal ini terkadang menjadi hambatan bagi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Kadang-kadang, dana yang dikeluarkan pemerintah tidak mencapai tujuan yang diinginkan atau bahkan tidak cukup untuk membantu masyarakat bangkit dari ketidakberdayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik..

Fakta bahwa masyarakat Kabupaten Pidie Jaya belum memanfaatkan sepenuhnya potensi sumber daya alamnya. Selain itu, banyak penduduk yang mengandalkan mata pencaharian mereka sebagai petani penggarap ladang dan

nelayan konvensional. Namun, pemerintah telah menyediakan berbagai program dan anggaran besar untuk mendorong kemajuan di setiap wilayah Indonesia. Namun, masyarakat belum mengalami perubahan yang signifikan, terutama masyarakat pinggiran kota. Akibatnya, upaya yang lebih efisien diperlukan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat di wilayah tersebut..

Kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat dengan Konsep di balik peningkatan produktivitas ini adalah ketersediaan pasar bagi barang-barang masyarakat tersebut. Untuk mewujudkan masyarakat Pidie Jaya yang lebih sejahtera, berdaya, dan hebat, program pemberdayaan yang diintegrasikan perlu didukung oleh semua pihak, terutama oleh pemimpin daerah. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), koperasi, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat di daerah tersebut..

Berdasarkan masalah tersebut, maka tertarik peneliti mengangkat judul tentang *Efektivitas Program Pengembangan*

2. Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan maksud untuk memahami dan menggali lebih dalam mengenai fenomena penyesuaian diri remaja panti asuhan. Menurut Sugiyono (2012:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Sugiyono (2012:1) metode

Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya.

1.1 Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas maka akan dibahas beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya?
2. Apa Saja Kendala Efektivitas Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya)?

1.2 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala apa saja yang dihadapi Efektivitas Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya.

penelitian kualitatif sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2012:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Program-program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya.

3.1 Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012: 80), "Populasi adalah wilayah generalisasi

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan". Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya yang penerima bantuan program pengembangan pemberdayaan masyarakat dari Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya. Menurut Sugiyono (2012: 81) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan jumlah sampel dilakukan sebuah sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas: 1 orang
- b. Sekeretaris : 2 orang
- c. Kepala Bidang: 1 orang
- d. Pegawai: 5 orang
- e. Kelompok Masyarakat: 15 kelompok

3. Hasil dan Pembahasan

Pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya, proses pelayanan umum terdiri dari unit-unit pelayanan yang melayani masyarakat secara langsung. Untuk mengukur keberhasilan pelayanan, para penerima pelayanan akan menerima indeks kepuasan pelayanan yang didasarkan pada kebutuhan dan harapan mereka yang sebenarnya. Setiap pelayanan publik umum di Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan untuk memastikan bahwa orang yang menerimanya dapat yakin dengan apa yang mereka terima. Standar pelayanan merupakan standar penyelenggaraan yang harus dipatuhi oleh pegawai umum dan masyarakat secara keseluruhan.. Standar pelayanan publik sekurang kurangnya meliputi:

1. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik.

Prosedur pelayanan harus dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan publik, termasuk pengaduan sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Prosedur pelayanan harus ditetapkan melalui standar pelayanan minimal, sehingga pihak penerima pelayanan dapat memaham mekanisme.

2. Waktu Penyelesaian

Standar pelayanan publik menetapkan waktu penyelesaian, yang dimulai pada saat pengajuan permohonan dan berakhir pada saat pelayanan termasuk pengaduan diselesaikan. Kepercayaan masyarakat pada pelayanan meningkat jika pelayanan diselesaikan lebih cepat..

3. Produk Pelayanan

Salah satu standar pelayanan publik adalah produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan harus dipahami secara luas, sehingga harus disosialisasikan kepada masyarakat..

4. Biaya Pelayanan

Salah satu standar untuk pelayanan publik adalah biaya pelayanan, termasuk rinciannya, harus ditentukan secara konsisten dan tidak diskriminatif karena akan menimbulkan ketidakpercayaan pemberi pelayanan kepada penerima pelayanan. Ini karena biaya ini akan menimbulkan kecemasan bagi orang-orang, terutama mereka yang kurang mampu.

5. Sarana dan Prasarana

Standar untuk pelayanan publik termasuk sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik sangat penting dan menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik..

6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Salah satu standar untuk pelayanan

publik adalah kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi ini harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk memberikan layanan yang berkualitas.

Efektivitas Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Pidie Jaya merupakan Kabupaten yang berada di pesisir pantai dengan mata pencaharian masyarakatnya sebagian nelayan dan sebagian lainnya petani, sehingga sektor perikanan dan pertanian saling menunjang dan memegang peranan penting sebagai penyedia kebutuhan bagi masyarakat. Upaya peningkatan produksi kedua sektor ini terus digalakkan dan dibudidayakan dengan baik dan benar. Kondisi masyarakatnya dari seluruh sisi kehidupan mulai terarah, tertata dan mencerminkan suasana perubahan mendasar. Percepatan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui koordinasi dan sinergitas program lintas sector/instansi hendaknya di pahami sebagai pencerminan semangat membangun daerah dan wujud komitmen bersama untuk maksud tersebut maka perlu upaya terobosan untuk keluar dari keblasaan atau kekakuan (*out of box*) melalui pengembangan kerja sama pemerintah dan seluruh stake holder pemerhati masalah masalah social sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, ketentuan yang berlaku bagi kebutuhan untuk program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya telah benar-benar merasakan program pemberdayaan masyarakat ini, seperti yang ditunjukkan oleh perubahan pendapatan orang-orang yang menerima bantuan tersebut. Pendapatan mereka sebelumnya tidak stabil, tetapi sekarang mereka lebih tenang dan tidak bingung mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan

bantuan ini. Selain itu, dengan bantuan ini, masyarakat dapat membiayai saudara yang sakit dan keluarganya, meskipun biaya rumah sakit sudah gratis ditanggung oleh BPJS tapi masyarakat juga harus mengeluarkan biaya untuk yang jaga orang sakit. Program pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan agar dapat mengurangi masyarakat yang miskin yang masih perlu perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya maupun Pemerintah Pusat. Diharapkan bahwa program pemberdayaan masyarakat ini akan diberikan kembali kepada warga sekitar yang kurang mampu setelah berhasil. Program ini akan berlanjut sampai semua orang di Kabupaten Pidie Jaya merasakan kebahagiaan bersama.. Program ini tldak akan berjalan dengan baik tanpa adanya gotong royong bersama. Dalam kegiatan

program pemberdayaan masyarakat,kebersamaan sangatlah penting untuk kemajuan hidup, maka dari itu program ini memerlukan kekompakan bersama tanpa adanya kekompakan dan gotong royong program ini tldak akan berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat ini sudah dikatakan berhasil karena dapat memberikan tingkat perubahan pada warga miskin yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Perubahan terlihat pada daya beli penduduk yang sebelumnya sangat sedikit, dan setelah mendapat bantuan program pemberdayaan masyarakat daya beli penduduk Kabupaten Pidie Jaya menjadi semakin meningkat. Pemberdayaan masyarakat di tahun 2017 baru dilakukan pendataan 1 kali yang hasilnya tidak mengecewakan, walaupun perubahan tidak begitu banyak setidaknya dengan program pemberdayaan tersebut dapat mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Pidie Jaya.

Berdasarkan hasil penelitian dan

temuan penelitian tersebut. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak mampu. Kebanyakan orang di Kabupaten Pidie Jaya adalah petani dan nelayan, yang berarti mereka tidak memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat ini setidaknya membantu mengurangi beban yang ditanggung oleh masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Program ini juga berdampak positif pada ekonomi Kabupaten Pidie Jaya dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat setempat. Sebelum program dimulai, sosialisasi diberikan kepada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Selain itu, masyarakat setempat menyambutnya dengan baik. Sebelum program ini dimulai, masyarakat Kabupaten Pidie Jaya diberitahu tentang program pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya. Mereka juga menjelaskan apa itu pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini disosialisasikan dengan sangat antusias. Program pemberdayaan masyarakat ini sangat dihargai oleh masyarakat karena dapat meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga.

Program pemberdayaan masyarakat ini sangat bagus dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Ini diperlukan karena banyak masyarakat di daerah ini miskin dan program ini telah mencapai tujuan yang diharapkan.

Masyarakat sangat tertarik untuk mendengarkan sosialisasi tentang program pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Sosialisasi diadakan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya. Setelah sosialisasi selesai, calon penerima manfaat dipilih. Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan Dinas atau Instansi Sosial Kabupaten berkolaborasi untuk menjadwalkan kegiatan penerimaan. Dalam proses seleksi calon penerima manfaat, penerima manfaat

juga diwawancarai melalui kunjungan ke rumah mereka untuk mengumpulkan informasi dari yang sudah menerima manfaat. Dinas Peternakan membantu program pemberdayaan masyarakat, yang sama dengan pemberdayaan hewan, yang berdampak besar pada bagaimana program ini berjalan. Masyarakat sangat membutuhkan pengetahuan tentang cara yang tepat untuk merawat hewan agar mereka tidak mudah sakit dan dapat berkembang biak. Dibutuhkan sosialisasi dari pihak Dinas Peternakan untuk memberikan informasi tentang segala sesuatu tentang pengembangbiakan hewan karena masyarakat penerima bantuan pemberdayaan, yang sebagian besar berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), masih kurang pengetahuan tentang ternak. Informasi tentang pengembangbiakan hewan diberikan setiap kali pemantauan, yang harus dilakukan setidaknya tiga bulan sekali dan diawasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya.

Program pemberdayaan masyarakat ini juga melakukan aktivitas tambahan, seperti pembinaan kelompok masyarakat penerima bantuan, yang diadakan pada tanggal 29 Oktober 2022. Di Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya, orang-orang yang menerima manfaat dari kegiatan ini berkumpul bersama. Semua orang berkumpul untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi dan kemajuan usahawan kelompoknya..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kelompok sangat penting bagi masyarakat Penerima manfaat di Kabupaten Pidie Jaya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pidie Jaya akan memberikan pembinaan kepada masyarakat Penerima manfaat bantuan. Masyarakat ingin tahu lebih banyak tentang pemanfaatan bantuan yang disalurkan dengan pembinaan ini. Selain itu, pembinaan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk

menyampaikan masalah mereka dan berbicara dengan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

4.1 Kendala-Kendala Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.

Tidak mungkin suatu program berjalan dengan baik tanpa kendala dalam menjalankannya. mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menerapkan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun hambatanannya berikut::

1. Kendala Eksternal

Salah satu kendala eksternal yang menghalangi Program Pemberdayaan Masyarakat yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya adalah adanya kecemburuan antara kelompok masyarakat yang lebih kuat dengan kelompok masyarakat yang lebih lemah. Faktor-faktor yang menghambat ini terutama berasal dari kecemburuan atau keirian antara kelompok masyarakat yang lebih kuat dengan kelompok masyarakat yang lebih lemah.

Masyarakat yang tidak menerima berpendapat bahwa orang lain harus menerima, meskipun saya juga seharusnya memiliki hak untuk menerima. Kadang-kadang, orang-orang yang sudah kaya ingin mendapat bantuan, dan ini juga terjadi di Kabupaten Pidie Jaya. Dalam suatu pelaksanaan program pasti ada hambatan yang akan terjadi, baik hambatan yang terjadi eksternal atau hambatan yang terjadi pada masyarakat sangatlah berbeda dengan apa yang dirasakan oleh pihak dalam atau pihak yang memberikan bantuan. setelah mendapat pengaduan oleh salah satu masyarakat yang memperoleh bantuan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan ungkapan masyarakat Pidie Jaya. Kendala

ini bahwasanya dalam suatu pelaksanaan program pasti ada hambatan yang akan terjadi. Hambatan yang terjadi baik eksternal atau yang terjadi pada masyarakat.

2. Kendala Internal

Adapun tingkat keberhasilan program yang sudah dijalankan dan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat Pidie Jaya adalah contoh hambatan internal. Namun, sayangnya, masih ada banyak hambatan internal dalam pelaksanaan program ini, terutama tentang informasi tentang menjaga, memanfaatkan bantuan dengan baik, dan anggaran yang sangat kecil. Kurangnya pengetahuan tentang manajemen bantuan yang efektif. Selain itu, pihak Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya bingung tentang apa yang dapat mereka lakukan karena mereka tidak memiliki biaya untuk mengadakan sosialisasi dan mengundang orang dari luar. Ini hanya bisa terjadi sekali atau dua kali, terlepas dari sisa anggaran. Oleh karena itu, mereka berusaha mengajukan proposal untuk meminta anggaran untuk sosialisasi.

Jadi, sangat penting bagi masyarakat untuk diinformasikan tentang cara mengelola bantuan. Selain itu, untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya membutuhkan anggaran yang memadai. Keseimbangan dan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Pidie Jaya tentang kemampuan, keinginan untuk memperbaiki diri, dan pencapaian kesejahteraan sosial, ditentukan oleh keseimbangan antara keduanya. Jelas bahwa Kabupaten Pidie Jaya telah melaksanakan program tersebut dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Namun, ada beberapa kelompok masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya yang sering

melakukan kesalahan saat menggunakan program pemberdayaan kesadaran masyarakat. Mereka sering memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh program ini untuk kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi, bukan untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak menghasilkan hasil yang bermanfaat. Program pemberdayaan masyarakat miskin diharapkan

meningkatkan kesejahteraan sosial warga. Dalam arti yang sangat luas, kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf hidup yang lebih baik ini mencakup aspek sosial, mental, dan spiritual kehidupan selain aspek ekonomi dan fisik.

4. Simpulan dan Saran

Penilaian efektivitas pengembangan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Pidie Jaya dilakukan dengan menghubungkan proses pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih mampan. Pada dasarnya mekanisme pengembangan pemberdayaan masyarakat telah mengakomodasi terciptanya peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan lingkungannya.

1. Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat yang tidak efektif tersebut terutama disebabkan oleh kapasitas masyarakat yang belum mampu mengambil peran yang signifikan dalam pemberdayaan. Kemauan dan kemampuan masyarakat menentukan seberapa besar program pengembangan pemberdayaan masyarakat. Kemampuan adalah gabungan antara pengetahuan (tahapan kognitif) dan ketrampilan (tahapan psikomotorik), sedangkan kemauan masyarakat adalah gabungan antara sikap membangun (tahapan afektif) dan pengetahuan (tahapan kognitif) masyarakat..
2. Proses menjalankan program pasti memiliki beberapa hambatan; tidaklah mungkin suatu program berjalan dengan baik tanpa hambatan. mengenai masalah yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menerapkan Program

Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, hambatan berikut:

- a. Kendala Eksternal
Faktor kecemburuan di antara kelompok masyarakat adalah hambatan eksternal yang menghalangi program pemberdayaan masyarakat yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya.
- b. Kendala Internal
Tingkat keberhasilan program yang sudah dijalankan dan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat Pidie Jaya adalah contoh hambatan internal. Namun, sayangnya, masih ada banyak hambatan internal dalam pelaksanaan program ini, terutama tentang informasi tentang menjaga, memanfaatkan bantuan dengan baik, dan anggaran yang sangat kecil.

5.1 Saran

Mencermati hasil dari penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan antara lain:

1. Efektivitas Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya perlu dilanjutkan, dengan menggunakan proses pemberdayaan yang dinamis atau menyesuaikan dengan tipologi keberdayaan masyarakat dan setiap

- selesai rangkaian pelaksanaan kegiatan program pengembangan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan evaluasi terhadap perkembangan keberdayaan masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya hendaknya menyediakan Dana secara rutin yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat lebih lanjut.
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Pidie Jaya agar mengadakan program pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa secara intensif dengan merekrut masyarakat yang menjadi pelaku guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dana bantuan.
- Daftar Pustaka**
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, cet. ke-
- Anwas, (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: ALFABETA
- Agung, Kurniawan (2010). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Alim Sumarno. (2012). *Perbedaan Penelitian dan Pengembangan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Edi Suharto. (2010) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Edwin B. Flippo, (2010). *Personel Management (Manajemen Personalia)*, Edisi VII Jilid II, Terjemahan Alponso S, Erlangga, Jakarta.
- Effendy. (2010). *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Rineka Cipta. Jakarta
- Halim, abdul. (2011). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Hasibuan, (2010). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masaah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Husein Umar. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali
- Hikmat, (2010) *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Jamasy, (2011). *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta : Belantika.
- Jones. (2011). *Manajemen kualitas pelayanan*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Koentjaraningrat. (2011). *Beberapa Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: UI Press.

Rahayu, Sri lestari. (2012). Bantuan Sosial Indonesia Sekarang dan ke Depan. Bandung: Fokusmedia.

Siagian, Sondang P, (2010). Filsafat Administrasi, Edisi revisi, Cetakan keempat. Jakarta.

Sugiyono, (2012), Metode Penelitian Administrasi, Bandung:Alfabet

Suharto, Edi. (2010). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Universal Bidang Kesehatan. Bandung : Alfabeta.

Sumaryadi, I Nyoman, 2007. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta:Cintra Utama

Wasistiono. (2010). Prospek Pengembangan Desa. CV. Bandung. Fokusmedia.

Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Hansyar, R. M. (2022). Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia.

Zulfikar, Z., & Suriadi, M. (2020). Strategy of Department of Industry and Cooperation of Pidie Jaya District in Developing Small and Medium Micro Enterprises. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 3(3), 2458-2464.